

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.5.Metode Penelitian	13
1.5.1.Tipe Penelitian.....	13
1.5.2.Pendekatan Masalah	13
1.5.3.Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4.Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5.Analisa Bahan Hukum.....	17

1.5.6.Pertanggungjawaban Sistematika 17

**BAB II BATASAN PENGATURAN FORUM EKSTERNUM DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2.1.Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia... 19

 2.1.1.*Forum Internum*..... 25

 2.1.2.*Forum Eksternum* 31

2.2.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... 38

 2.2.1.Wewenang dan Prosedur Pembentukan Undang-Undang..... 41

 2.2.2. Materi Muatan Undang-Undang..... 44

 2.2.3.Ketentuan ‘*Directory*’ dan ‘*Mandatory*’ dalam Undang-Undang49

**BAB III ANALISIS PENGATURAN FORUM EKSTERNUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

3.1 Riwayat Pembahasan UU JPH 52

 3.1.1.Pembahasan Tingkat I RUU JPH 55

 3.1.2.Pembahasan Tingkat II RUU JPH 57

3.2.Materi Muatan UU JPH..... 60

 3.2.1.Preliminary Provision 62

 3.2.2.Substantive Provision 66

 3.2.3.Adminsitrative Provision 67

3.2.4. Penal Provision	70
3.2.5. Transitional Provision.....	72
3.3. Analisis Pengaturan <i>Forum Eksternum</i> dalam UU JPH.....	72
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Saran	82
DAFTAR BACAAN	80

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344)
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-XV/2017 .